

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### **3.1 Gambaran Umum DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Bangka Belitung atau DPRD Babel) merupakan badan legislatif yang berfungsi sebagai bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. DPRD Bangka Belitung terbentuk dari 45 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Kepemimpinan DPRD Bangka Belitung terdiri dari satu Ketua dan tiga Wakil Ketua yang dipilih dari partai politik yang memenangkan jumlah kursi dan dukungan suara terbanyak dalam pemilihan. Anggota DPRD Bangka Belitung saat ini dipilih melalui pemilihan umum tahun 2019 dan secara resmi dilantik pada tanggal 24 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yaitu Kornel Sianturi, dalam suatu acara yang diadakan di Gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dalam periode 2019-2024, anggota DPRD Bangka Belitung terdiri dari perwakilan dari 9 partai politik yang berbeda. Partai PDI Perjuangan memegang jumlah kursi terbanyak, yaitu 10 kursi. Partai Golkar meraih 7 kursi, sementara Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama-sama mendapatkan 6 kursi. Dalam Pemilu 2014, DPRD Kepulauan Bangka Belitung memilih 45 anggota yang dibagi menjadi beberapa kelompok atau fraksi.

#### **3.2 Visi dan Misi**

Visi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah “Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang professional dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Provinsi Bangka Belitung”.

Misi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Antara lain adalah:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan administratif untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- c. Meningkatkan kualitas kuantitas sarana/prasarana kerja.
- d. Mendukung pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

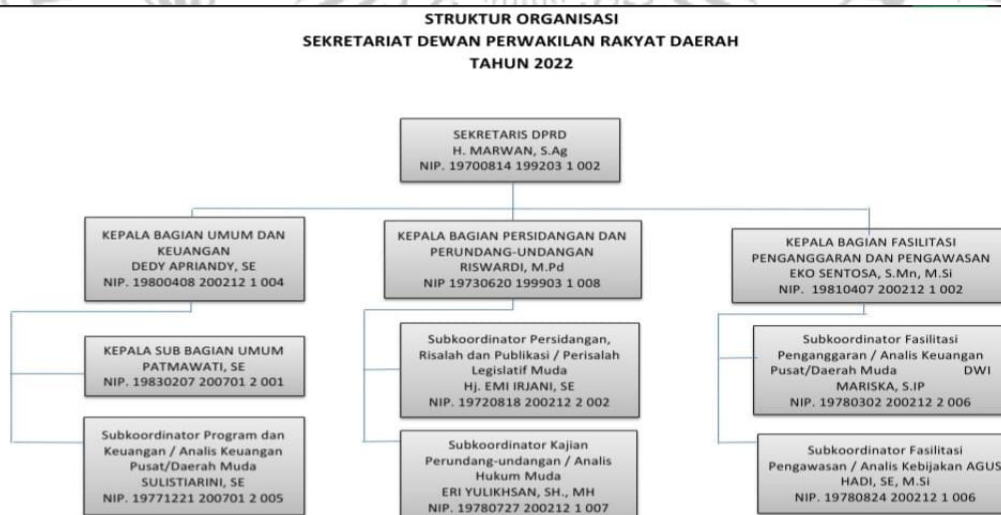
### 3.3 Struktur Organisasi

Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Alamat Jalan Komplek Perkantoran Gubernur No.31, Air Itam, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang. Terdapat 45 anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang berasal dari 7 kabupaten/kota. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi:

1. Ketua: Herman Suhadi (PDIP)
2. Wakil Ketua I : Hendra Apollo (Golkar)
3. Wakil Ketua II: Muhammad Amin (Gerindra)
4. Wakil Ketua III: Amri Cahyadi (PPP)

Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ahanya berisi anggota dewan namun juga sekretariat DPRD juga. Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab melaksanakan administrasi kesekretariatan, keuangan, proses persidangan dan perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, serta tugas-tugas lain yang mendukung kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di bawah ini adalah diagram organisasi untuk Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Gambar 3. 1** Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2022



### 3.3.1 Komposisi Anggota




**Tabel 3. 1** Komposisi Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
 <a href="#">PKB</a>	2	▼ 0
 <a href="#">Gerindra</a>	5	▲ 6
 <a href="#">PDI-P</a>	11	▼ 10
 <a href="#">Golkar</a>	7	— 7
 <a href="#">NasDem</a>	1	▲ 5
 <a href="#">PKS</a>	4	— 4
 <a href="#">PPP</a>	6	— 6
 <a href="#">PAN</a>	3	▼ 1
 <a href="#">Hanura</a>	2	▼ 0
 <a href="#">Demokrat</a>	3	▲ 5
 <a href="#">PBB</a>	1	— 1
<b>Jumlah Anggota</b>	<b>45</b>	<b>— 45</b>
<b>Jumlah Partai</b>	<b>10</b>	<b>▼ 9</b>

### 3.3.2 Fraksi

Fraksi adalah sebuah forum di mana anggota DPRD berkumpul dengan tujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi terdiri dari anggota yang jumlahnya setidaknya sama dengan jumlah komisi di DPRD Minimal empat orang merupakan anggota dari satu fraksi di DPRD Bangka Belitung. DPRD Bangka Belitung untuk periode 2019-2024 terdiri dari tujuh fraksi, dan dua di antaranya adalah gabungan fraksi sebagai berikut:

**Tabel 3. 2** Jumlah Fraksi-fraksi Dalam DPRD Kepulauan Bangka Belitung

Nama Fraksi	Partai Politik	Ketua	Jumlah Anggota
PDI Perjuangan	 <a href="#">PDI-P</a>	Herman Suhadi	10
Golkar	 <a href="#">Golkar</a>	Alfagry Rahman	7
Gerindra	 <a href="#">Gerindra</a>  <a href="#">PAN</a>	Beliadi	7
PPP	 <a href="#">PPP</a>	Hellyana	6
NasDem	 <a href="#">NasDem</a>	Agung Setiawan	5
Demokrat	 <a href="#">Demokrat</a>  <a href="#">PBB</a>	Nico Plamonia Utama	6
PKS	 <a href="#">PKS</a>	Dody Kusdian	4

### 3.3.3 Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan (BK)
7. Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

### 3.3.4 Pimpinan AKD

**Tabel 3. 3** Daftar Pimpinan AKD

Nama AKD	Ketua	Wakil Ketua	Jumlah Anggota
Pimpinan DPRD	Herman Suhadi (PDI-P)	Hendra Apollo (Golkar)	4
Badan Musyawarah		Muhamad Amin (Gerindra)	
Badan Anggaran		Amri Cahyadi (PPP)	
Badan Kehormatan	Sukirman (NasDem)	Tony Purnama (PPP)	5
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Nico Plamonia Utama (Demokrat)	Ariyanto (PDI-P)	11
Komisi I	LogoPPP Hellyana	Algafry Rahman (Golkar)	11
Komisi II	Adet (PDI-P)	Bong Ming Ming (PKS)	11
Komisi III	Efredi Effendi (Golkar)	Agung Setiawan (NasDem)	10
Komisi IV	Jawarno K.S. (Gerindra)	Dede Purnama Alzulami (PPP)	10

### 3.3.5 Jenis-Jenis Rapat

Pertemuan yang diadakan oleh DPRD akan menghasilkan catatan pertemuan atau laporan yang akan diikuti dengan tindakan. Pertemuan dan laporan ini bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni pertemuan yang terbuka untuk umum dan pertemuan yang bersifat rahasia. Secara umum, semua pertemuan DPRD dilakukan secara terbuka untuk umum, walaupun ada beberapa yang dapat disetujui sebagai pertemuan tertutup. Pada pertemuan tertutup, masalah-masalah yang dibicarakan tidak tersedia untuk akses oleh masyarakat umum. Meskipun demikian, beberapa informasi akan diberikan kepada masyarakat, khususnya hal-hal yang telah mendapatkan persetujuan untuk diumumkan.

- Rapat Pari Purna

Pertemuan Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan

merupakan lembaga paling tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan DPR-RI. Diketahui oleh ketua DPR dan dihadiri oleh setidaknya tiga anggota pimpinan DPR. Tiap pertemuan paripurna DPR-RI dimulai dengan sesi pengungkapan aspirasi dari setiap anggota yang mewakili daerah pemilihan. Dalam setiap pembukaan pertemuan paripurna DPR-RI, menyanyikan atau memutar lagu kebangsaan "Indonesia Raya" merupakan tugas yang harus dilakukan. Pertemuan yang bersifat situasional, baik yang dapat diikuti oleh umum maupun yang tidak dapat diikuti oleh umum.

- **Rapat Pari Purna Istimewa**

Ini adalah pertemuan seluruh anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua untuk melangsungkan acara khusus, tanpa melakukan pembuatan keputusan. Umumnya, hal ini terjadi dalam konteks perayaan hari besar atau acara seremonial, seperti upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Ini termasuk salah satu jenis pertemuan yang dilakukan secara terbuka.

- **Rapat Pimpinan DPRD**

Ini adalah pertemuan kepemimpinan yang dipimpin oleh ketua DPRD dan bersifat rahasia, tidak diumumkan kepada media atau masyarakat umum.

- **Rapat Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah adalah sebuah entitas yang mengambil keputusan bersama setelah melalui proses debat dan perbincangan kolektif. Dalam pertemuan Badan Musyawarah, kepemimpinan diemban oleh ketua dan wakil ketua Badan Musyawarah. Contoh-contoh Badan Musyawarah mencakup lembaga legislatif, dewan direksi, badan administratif, serta pertemuan anggota dalam serikat, klub, atau organisasi lainnya. Keputusan yang dihasilkan oleh badan ini biasanya diputuskan melalui proses pemungutan suara, perdebatan, dan perubahan, sesuai dengan aturan atau prosedur parlemen yang umumnya berlaku. Pertemuan Badan Musyawarah ini bersifat rahasia

dan tidak diumumkan oleh media massa.

- **Rapat Komisi**  
Ini adalah pertemuan anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi, dan umumnya diadakan dalam situasi atau acara khusus. Pertemuan ini diadakan secara situasional, terutama disebabkan oleh adanya pertemuan komisi keuangan yang memiliki karakter teknis dan berlangsung dalam kerahasiaan.
- **Rapat Gabungan Komisi**  
Pertemuan-pertemuan komisi yang diinisiasi oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- **Rapat Badan Anggaran**  
Ini adalah pertemuan anggota Badan Anggaran yang diketuai oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran. Pertemuan ini bersifat rahasia karena melibatkan aspek privasi Badan Anggaran.
- **Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Perda**  
Pertemuan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Perda untuk membahas dan mengembangkan peraturan daerah. Pertemuan ini dilakukan dalam kerahasiaan karena pembahasannya masih dalam tahap penyusunan (drafting) sebelum dibawa ke pertemuan paripurna yang bersifat terbuka.
- **Rapat Badan Kehormatan**  
Pertemuan Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan. Pertemuan ini diselenggarakan dengan menjaga kerahasiaan.
- **Rapat Panitia Khusus**  
Pertemuan anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh media publik.
- **Rapat Kerja**  
Ini merupakan pertemuan antara DPRD, Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan kepala daerah atau

pejabat yang telah ditunjuk. Umumnya, pertemuan ini digunakan untuk membahas perencanaan pekerjaan atau permasalahan tertentu dalam pertemuan komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPBD) atau dengan pimpinan Dinas atau Kepala Dinas lainnya.

- Rapat dengar pendapat

Pertemuan DPRD dengan berbagai narasumber dari dunia akademisi, pemangku kepentingan, pakar, ahli, serta pemerintah, yang memiliki agenda yang beragam dan memerlukan masukan dari para ahli dan teknisi di berbagai bidang permasalahan. Ini adalah pertemuan terbuka karena melibatkan pendengaran aspirasi dari masyarakat umum.

- Rapat Fraksi

Ini merupakan pertemuan anggota Fraksi yang dipimpin oleh ketua Fraksi atau wakil ketua Fraksi, dan sifat pertemuan ini bisa rahasia atau terbuka, tergantung pada situasinya.

- Rapat Konsultasi

Ini adalah pertemuan antara pemimpin DPRD dengan pemimpin Fraksi dan pemimpin komite-komite DPRD yang diawasi oleh pemimpin DPRD itu sendiri. Pertemuan ini hanya ditujukan bagi anggota internal dan bersifat rahasia.

- Rapat dengar pendapat umum

*Public hearing* merupakan peluang bagi masyarakat umum, baik perorangan maupun kelompok, organisasi atau aliansi organisasi, untuk datang ke DPRD dan menyampaikan aspirasi mereka, baik secara langsung atau tidak langsung. Ini adalah proses yang terbuka karena melibatkan pendengaran aspirasi dari masyarakat umum.